

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pengaruh variabel-variabel independen yaitu IPM, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pengangguran terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Variabel IPM memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis karena dengan IPM yang semakin berkualitas akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan karena masing-masing daerah memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda-beda.
2. Variabel PDRB memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis karena PDRB yang semakin naik mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Variabel jumlah penduduk memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan.
4. Variabel Pengangguran memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis karena Pengangguran yang semakin turun mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

5.2 Implikasi

Implikasi yang dapat disampaikan atas temuan empiris dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah berusaha menurunkan tingkat kemiskinan dengan tidak hanya menekan angka pentingnya pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan tentang pemerataan pendapatan dan distribusi pendapatannya.
2. Indeks pembangunan manusia, PDRB, dan pengangguran memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, untuk itu diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap terus meningkatkan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dengan langkah-langkah kebijakan yang mampu memberantas kemiskinan lebih baik lagi. Memperluas jaminan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan melakukan berbagai inovasi baru dalam meningkatkan mutu barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi dalam mengambil keputusan untuk menetapkan upah minimum kabupaten yang sesuai dengan KHL 68 (kebutuhan hidup layak). Karena upah minimum yang tidak disesuaikan dengan KHL (kebutuhan hidup layak) akan tetap membuat para pekerja atau buruh kekurangan didalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
4. Pemerintah diharapkan memutuskan suatu kebijakan dengan lebih mempertimbangan secara keseluruhan dampak apa yang akan terjadi dengan masyarakat diberbagai golongan.